

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.2682](https://doi.org/10.36859/JP.V2I1.2682)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 22 Agustus 2024 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 13 Februari 2025

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

Ulfah Sopiah Wati¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Toto Kushartono³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Artikel ini berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Di latarbelakangi dengan adanya fenomena masalah pada Collaborative Governance dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Teknik analisis data melalui analisis setelah lapangan, analisis selama dilapangan, dan analisis setelah lapangan dengan berlandaskan pada teori Ansel dan Gash (dalam Rahayu, 2020: 144-146), dimana proses kolaborasi yang terjadi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, kemenangan kecil. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bahwa *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung menunjukkan dari kelima faktor dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, kemenangan kecil dari pihak BPBD sudah melakukan upaya yang sudah optimal dimana berangsur-angsur banjir di kabupaten bandung teratasi satu-persatu meskipun belum sepenuhnya.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan, Bencana

Abstract

In the background of the phenomenon of problems in Collaborative Governance in disaster management in Bandung Regency. The purpose of this study is to determine how Collaborative Governance handles disaster management in Bandung Regency. Data collection techniques through literature studies, observations, interviews, and documentation with the stages of data collection carried out by observation, interviews, documentation, and a combination of the four. Data analysis techniques through analysis after the field, analysis during the field, and analysis after the field based on the theory of Ansel and Gash (in Rahayu, 2020: 144-146), where the collaboration process that occurs: face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding, small victories. The results of the study show overall that Collaborative Governance in disaster management in Bandung Regency shows that from the five factors of face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding, small victories from the BPBD, efforts have been made that are

optimal where gradually the floods in Bandung Regency have been resolved one by one, although not completely.

Keywords: Collaborative Governance, Countermeasures, Disaster

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung merupakan tempat yang paling sering kali terjadi banjir. Bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, namun pula ditentukan oleh faktor sosial misalnya terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang lalu memperlebar daerah pemukiman sebagai akibatnya sehingga tidak sejalan lagi menggunakan daya dukung lingkungan yang ada. Berbagai upaya sudah dilakukan membuat pencegahan agar masyarakat tidak terdampak banjir lagi. Banjir yang sering terjadi di Jawa Barat adalah di wilayah Kabupaten Bandung. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuh Kolot dan Kecamatan Bojong Soang merupakan wilayah yang memiliki frekuensi tertinggi dan paling luas terkena banjir. Banjir di wilayah Kabupaten Bandung merupakan banjir langganan tahunan yang merupakan dampak dari meluapnya aliran sungai Citarum. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung merupakan banjir rutin yang selalu datang setiap tahun terutama dimusim penghujan.

Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang mempunyai karakteristik fisiografi wilayah berupa cekungan, sering mengalami banjir. Hampir di tiga kecamatan menjadi titik rawan banjir. Pada saat musim hujan, timbul banjir dan genangan yang bervariasi ketinggiannya. Selain faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, terjadinya banjir di Kabupaten Bandung disebabkan oleh banyaknya permukiman di bantaran sungai, bahkan adanya bangunan di atas saluran air yang mengakibatkan fungsi saluran air tidak maksimal dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, dimana masih ada warga masyarakat yang membuang sampah di sungai dan saluran air. Bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung ini adalah bencana banjir. Sampai saat ini, masyarakat wilayah Kabupaten Bandung masih merasakan dampak banjir. Cakupan wilayah banjir masih dirasakan oleh Warga Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah.

Banjir di Kabupaten Bandung telah menimbulkan dilema bagi masyarakat, dan sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka.

Dari kurun waktu 2009 sampai dengan 2023 banjir masih tetap menjadi bencana langganan di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Bencana banjir ini telah menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk kesiagaan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 dijelaskan bahwa penyelenggaran penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya termasuk penetapan kebijakan pembangunan untuk mengatasi resiko bencana, pencegahan, tanggap darurat, dan kegiatan pemulihan kembali.

Upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencegah banjir di Kabupaten Bandung terutama di tiga titik yaitu Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang namun permasalahan banjir belum seluruhnya teratasi hingga saat ini masih ditemukannya titik-titik genangan air di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bandung ketika musim penghujan datang. Parameter yang mempengaruhi tingkat kerawanan daerah terhadap banjir diantaranya curah hujan yang sangat tinggi, penggunaan lahan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, dan tekstur tanah. Disisi lain apa bila musim penghujan tiba debit air menaik, sampah-sampah rumah tangga begitu terlihat di sepanjang aliran sungai Citarum yang hanyut terbawa arus. Hal ini menandakan masyarakat masih bandel dengan membuang sampah dengan sembunyi-sembunyi.

Masalah penanganan banjir membutuhkan koordinasi yang terpadu dari berbagai Instansi pemerintah. Koordinasi antar instansi yang terjadi saat ini pada penanggulangan banjir Kabupaten Bandung, menurut data yang dikumpulkan, menunjukkan indikasi masalah di antaranya, Pertama, belum adanya sinergitas dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan secara menyeluruh dalam hal proses penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Daerah (BPBD) bersama dengan SKPD/ instansi sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya pencapaian sasaran dalam penanggulangan banjir Kabupaten Bandung. Koordinasi belum teralokasikan dengan baik, ini terjadi pada tahap pencegahan saat terjadi potensi bencana yaitu pada

kegiatan mitigasi, seperti kegiatan pengeringan sungai, pengelolaan sumber air, ataupun pembuatan tanggul.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas social secara individual maupun kelompok Sukmadinata (2009). Metode penelitian kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai maalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara keseluruhan dan dengan memodelkan secara verbal dan linguistic, dalam konteks yang alami dan menggunakan menggunakan metode naturalistic yang berbeda Moleong (2008:6). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kulitas atau keistimewaan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif Saryono (2010:9). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alami yang menggambarkan masalah sosial seseorang dari prepektif perilaku. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis dan kemudian melaporkan fenomena tersebut dalam suatu hasil analisis penelitian. Penelitian ini membandingkan banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Baleendah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi. Aspek yang diamati meliputi kondisi alam di tiga kecamatan yang diteliti, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, budaya (tradisi dan nilai-nilai) yang telah dibangun disana dan struktur sosial, pergaulan masyarakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel bertujuan adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan identifikasi karakter khusus yang

relevan dengan tujuan penelitian sehingga masalah penelitian dapat terjawab.

PEMBAHASAN

Dalam upaya *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten Bandung oleh BPBD yaitu di dukung dan di bantu oleh swasta dan masyarakat. Kolaborasi itu sendiri dimaknai sebagai upaya dalam pembentukan kerja sama, interaksi, serta kompromi antara beberapa elemen baik itu dengan individu dengan individu, lembaga dengan lembaga maupun lembaga dengan individu yang kemudian terlibat dalam kolaborasi tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dan akan mendapat akibat atau manfaat. Peneliti akan membahas pada *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung. Dengan hal ini, untuk mendalami penelitian tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan teori Ansell & Gash (2008) bahwa dalam proses kolaborasi memperhatikan 5 tahapan diantaranya sebagai berikut.

***Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung**

1) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Sebagai proses memecah kecurigaan antar aktor dan hambatan komunikasi lainnya dalam rangka mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal kolaborasi serta merupakan suatu inti proses untuk membangun kepercayaan dan komitmen terhadap suatu proses. Berkaitan dengan hal tersebut dalam membentuk kolaborasi pada tahapan ini tentunya dibutuhkan suatu komunikasi yang baik, dengan melakukan suatu negosiasi dalam mencapai suatu kesepakatan. Maka dari itu, Hubungan BPBD dengan masyarakat ini mengindikasikan bahwa peran BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana melakukan fungsi antisipasi yang merupakan prinsip dari penanggulangan bencana, dan adanya kerja sama antar pemerintah.

Dalam hal ini, BPBD yang berkecimpung lebih dalam penanggulangan bencana serta berkerja dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah kerugian akibat banjir. Selain sosialisasi BPDBD terus melakukan kordinasi dengan masyarakat. Dengan sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal kepada masyarakat dalam hal tanggap darurat pun diharapkan bisa saling memberikan informasi dan saling berkesinambungan karena tujuan BPBD hanya memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar ketika terjadinya bencana banjir di Kecamatan Baleendah tidak berdampak yang sangat merugikan masyarakat. Kemudian sosialisasi yang dilakukan agar dapat memberikan bekal kepada masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dengan pengetahuan dan himbauan sehingga masyarakat bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Berjalanya hubungan koordinasi antar anggota BPBD dan masyarakat kedepanya diharapkan bisa mengantisipasi bencana banjir dengan baik dan mengurangi dampak banjir yang tak diharapkan.

2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses kolaborasi bukan hanya mengenai negosiasi saja tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan di antara para stakeholder, maka upaya membangun kepercayaan seringkali menjadi aspek yang penting dari proses awal kolaboratif dengan membentuk suatu kolaborasi bukan hanya sekedar negosiasi saja tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen diantara para stakeholder. Maka dari itu, peran pemerintah disini sudah melaksanakan tugas dan bertindak sebagaimana seharusnya seorang yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan sesuai fungsinya dengan bidang yang ada di BPBD Kabupaten Bandung sehingga masyarakat mampu merasakan dampak dari kinerja BPBD selama ini dalam mengatasi dampak banjir yang ada.

3) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap kolaborasi merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu proses kolaborasi yang jelas, transparan dan adil sangat penting untuk dilakukan dalam meningkatkan komitmen stakeholder. Komitmen lembaga publik yang lemah untuk berkolaborasi, sering dipandang masalah khusus yang sering terjadi. Komitmen bergantung kepada kepercayaan antar aktor-aktor lain dalam menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Komitmen dari para stakeholder dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kolaborasi meskipun dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema, misalnya stakeholder harus mematuhi hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut mengharuskan bergabung dengan stakeholder yang berbeda pandangan. Maka dari itu, dengan adanya komitmen tersebut karena dengan adanya komitmen tersebut masyarakat bisa ikut serta dalam kolaborasi dalam terjadinya banjir jadi bukan hanya pemerintah saja yang bekerja tetapi masyarakat juga ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir tersebut.

4) Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Pada titik tertentu dalam sebuah proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman yang sama juga akan menyiratkan kesepakatan mengenai permasalahan yang dihadapi dan juga pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Saling berbagi pemahaman dalam membentuk suatu pemahaman bersama antar pemangku kepentingan merupakan salah satu hal terpenting dalam membentuk suatu kolaborasi agar terjadi satu kesatuan pandangan dalam melakukan kegiatan kolaborasi. Namun dalam membentuk suatu pemahaman bersama dalam upaya penanggulangan bencana banjir dimana masih kurang kesadarannya masyarakat dalam menjaga dalam melestarikan lingkungan dan menjadi sebuah hambatan karena masyarakat masih belum menyadari

arti pentingnya kebersihan, perubahan pola sungai dan cuaca yang kurang menentu.

5) Kemenangan Kecil (*Intermediate Outcome*)

Sejumlah studi kasus menunjukan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi apabila tujuan memungkinkan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan menghasilkan kemenangan- kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini dapat memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus dalam membangun kepercayaan dan komitmen ke arah yang lebih baik. Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi apabila tujuan memungkinkan dan keuntungan kolaborasi relatif nyata dan menghasilkan kemenangan- kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini dapat memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif serta mendorong siklus dalam membangun kepercayaan dan komitmen ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, terkait dengan pencapaian dari suatu kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir dimana masyarakat sudah mendapatkan hasil dari penyuluhan, pengetahuan, peringatan dan sosialisasi dari pemerintah dalam mengatasi bencana banjir dan juga masyarakat sudah lebih menyadari bertapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar serta pemerintah juga melakukan pembuatan tanggul yang ada di sekitaran rawan banjir.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis tarik mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung yakni; pertama, adanya suatu dialog tatap muka antara pemangku kepentingan. Kedua, membangun kepercayaan artinya terbentuknya suatu sikap saling percaya antara pemangku kepentingan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Ketiga, komitmen terhadap proses yakni kolaborasi masyarakat dengan Pemerintah setempat dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bandung. Keempat, berbagi pemahaman artinya membangun pemahaman bersama serta adanya suatu sikap saling memahami dalam menjalankan suatu kegiatan atau kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan kelima, kemenangan kecil artinya adanya suatu capaian hasil sementara dari suatu kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, M. R. (2021). Analisis Spasial Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis Dikabupaten Bandung.
- Bencana, B. P. (Edisi 2017). Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.
- Bencana, B. N. (2012). Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana .
- Bencana, B. N. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.
- Creswell, J. W. (2012). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran Edisi Ketiga. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Dewi Wahyuni, S. A. (2022:6(2)). Pemanfaatan Sistem Informasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana. Pendipa Journal Of Science Education, 516-521.
- Drs. Salim, M. &. (2012). Metodologi Penelitian. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Ella Yulaelawati, U. S. (2008). Mencerdasi Bencana. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang.
- Syahrum, S. &. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana